

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

II.1 Kajian Pustaka

Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan terluas setelah negara Brazil maka tidak heran eksploitasi terhadap hutan demi menumbuhkan industri perkebunan sangatlah cepat. Begitu masifnya perkebunan kelapa sawit yang merubah hampir sebagian hutan tropis di Indonesia saat ini. Salah satu faktor yang menjadi pemicu adalah permintaan dunia terhadap minyak yang membuat kelapa sawit menjadi primadona baru. Perubahan ini diikuti oleh keinginan masyarakat yang bermula dari karet berubah menjadi kelapa sawit. Menurut Schwarze, S., Euler, M., Gatto, M., Hein, J., Hettig, E., Holtkamp, A. M., . & Moser, S. (2015) mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mana masyarakat lebih memilih kelapa sawit ketimbang karet seperti penghasilan lebih besar daripada karet, pekerjaan kelapa sawit lebih ringan ketimbang karet yang bekerja rutinitas serta pengaruh harga dari kelapa sawit dan karet.

Investasi-investasi perusahaan besar asing dan negara secara masif membuka lahan-lahan baru untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Dengan banyaknya perusahaan-perusahaan berinvestasi maka akan banyak pula membutuhkan tenaga kerja. Sesuai dengan sebuah penelitian Ismed, S. B., Mariana, M., & Taufik, H. (2012) mengatakan bahwa kebutuhan

tenaga kerja setiap tahun akan meningkat dengan semakin banyaknya perusahaan perkebunan berskala besar masuk ke Indonesia. Ini berbanding lurus dengan masih ada lahan basah yang belum dimanfaatkan oleh komoditi lain serta mengikuti permintaan dunia terhadap minyak kelapa sawit.

Pembukaan lahan yang begitu luas memunculkan konflik-konflik perusahaan dengan masyarakat. Tidak lain permasalahan utama adalah lahan perusahaan yang berdampingan langsung dengan lahan masyarakat terlebih lagi klaim perusahaan terhadap lahan masyarakat. Menurut Srikujam, D. O. (2015) bahwa permasalahan itu muncul dari perbedaan segi luas lahan yang diberikan dari versi KUD, versi Pemerintah Daerah dan versi Perusahaan. Kemudian pendapat lain didukung oleh Krishna, V., Euler, M., Siregar, H., & Qaim, M. (2016) yang menyoroti selalu ada konflik sosial dan konflik lahan antara petani kecil dengan perusahaan perkebunan. Konflik lahan sudah terjadi lama dan pemerintah hanya sebagai penonton serta cenderung lebih memihak kepada pihak perusahaan. Tidak juga heran pihak perusahaan menggunakan kekuatan militer untuk dapat menahan gejolak kemarahan masyarakat. Seharusnya pemerintah bisa meminimalisir konflik tersebut agar tercapai upaya solusi yang baik bagi kedua belah pihak antara masyarakat dengan pihak perusahaan.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan salah satunya adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berdasarkan pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas . *Corporate Social Responsibility* secara harfiah diartikan sebagai tanggung jawab sosial suatu perusahaan. Dalam penelitian Suwandi, S., Keban, Y. T., & Martono, E. (2016) mengatakan bahwa praktik CSR itu sendiri menjadi salah satu upaya untuk meredam konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan. Salah satu upaya ini adalah perusahaan membuat program berkelanjutan terhadap masyarakat baik itu dalam bentuk pendidikan, keterampilan, pembinaan masyarakat dan lain-lainnya.

Banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk memberdayakan para petani-petani kecil yang swadaya. Menurut Baswir, R., Achmad, N., Santosa, A., Indroyono, P., Hudiyanto, W. I., Winarni, R. R., & Hanu, M. A. (2010) mengatakan bahwa banyak hal yang bisa ditempuh pemerintah demi memberdayakan para petani-petani mandiri/ swadaya maupun koperasi. Salah satunya adalah peninjauan kembali HGU yang telah ada agar dapat mengembalikan hutan-hutan adat milik masyarakat. Pemerintah harus melakukan penghentian pemberian izin baru terhadap perusahaan-perusahaan besar baik dalam maupun luar negeri. Pemerintah membuat kebijakan pemetaan perkebunan kerakyatan diluar kemitraan

perusahaan karena selama ini porsi sangat kecil yang didapat oleh para petani mandiri/swadaya.

Pola kemitraan sangat relevan pada saat ini karena kemitraan yang dijalin oleh perusahaan dengan masyarakat sekitar akan mengurangi konflik-konflik yang ada. Pola kemitraan pada awal disebut dengan Perkebunan Inti Rakyat (PIR). PIR ini ada yang untuk masyarakat asli sekitar dan kemudian untuk masyarakat transmigrasi/ pendatang. Program tersebut disempurnakan kembali dengan skema program atau sering disebut dengan (KKPA). Menurut Perdana, A. (2008) mengatakan bahwa program KKPA ini sangat efektif dalam meningkatkan pendapatan para petani dan juga terdapat perubahan perilaku dan tindakan dalam pengelolaan perkebunan dibanding dengan petani yang tidak/tanpa program KKPA. Perubahan ini adalah dampak dari pembinaan dari perusahaan dengan memberi bimbingan terhadap anggota KKPA dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

Program pola pembagian sawit model KKPA sangat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. model-model seperti ini harus dikembangkan lebih baik lagi agar ada program berkelanjutan dari perusahaan untuk masyarakat sekitar. Dalam penelitian Syahza, A. (2015) menjelaskan bahwa model kredit koperasi primer anggota (KKPA) sebagai salah satu alternatif dalam meningkatkan perekonomian

masyarakat sekitar terutama mereka-mereka masyarakat yang berkebun dengan mandiri/swadaya.

Hasil penelitian yang berbeda dari Dwiprabowo, H. (2005) mengatakan bahwa terdapat banyak faktor yang menjadi kegagalan dalam pola koperasi kredit yakni terdapatnya perantara, petani memerlukan biaya besar dalam sertifikasi tanah, diberikannya lahan yang curam sehingga memerlukan biaya yang tinggi dalam pembuatan terasering. Model kredit-kredit bersifat terbatas (kaku) kurang memperhatikan kebutuhan riil petani dan kondisi sosial budaya ekonomi masyarakat setempat serta kelembagaan yang mengurus kredit terlalu gemuk.

Dalam hal pembuatan sebuah kebijakan pemerintah dituntut bisa memperkirakan kekuatan dan kelemahan yang ada terutama dalam program kemitraan. Menurut Nkongho, R. N., Feintrenie, L., & Levang, P. (2014) menjelaskan bahwa pemerintah harus bisa melihat kekuatan dan kelemahan dari perkebunan kelapa sawit agar ada upaya keberlangsungan sumber daya alam. Kelemahan yang terjadi selama ini kurang maksimalnya pola kemitraan antara perusahaan besar dengan rakyat setempat. Apabila kebijakan kemitraan dapat dimaksimalkan maka akan banyak sekali keuntungan yang didapat dan salah satunya upaya peningkatan ekonomi masyarakat.

Pola kemitraan ini sangat penting karena dianggap menjadi salah satu roda penggerak pertumbuhan perekonomian masyarakat. Menurut Coleman, M., & Okyere, D. O. (2016) mengatakan bahwa peran sektor swasta sangat diperlukan sebagai penggerak roda pertumbuhan ekonomi masyarakat. pemerintah dan pemangku jabatan harus bisa mengambil kebijakan yang amat baik untuk bisa menggerakkan roda perekonomian masyarakat yang bermitra terhadap sektor swasta.

Selain sebagai penggerak perekonomian masyarakat, pola kemitraan ini juga bisa memberikan dampak lain seperti sertifikasi tanah, sertifikasi para petani dan lain-lain. Menurut Hidayat, N. K., Glasbergen, P., & Offermans, A. (2015) untuk dapat meningkatkan pendapatan perekonomian para petani dengan skema kemitraan dan petani mandiri/swadaya dengan cara salah satunya adalah sertifikasi berkelanjutan. Senada dengan Mohd Noor, F., Gassner, A., Terheggen, A., & Dobie, P. (2017) yang mengatakan bahwa begitu pentingnya program-program berkelanjutan dari pola kemitraan untuk produksi kelapa sawit terhadap masyarakat sekitar. Salah satu contohnya adalah Sertifikasi berkelanjutan bertujuan agar para petani bisa melakukan kegiatan berkebun yang memperhatikan dampak lingkungan serta menggunakan teknologi tepat guna. Sertifikasi berkelanjutan berfokus pada aktor /petani agar dapat meningkatkan kualitasnya. Sama halnya

dengan Van der Ende, S. (2013) mengatakan bahwa perlunya sertifikasi tanah perkebunan sawit serta para petaninya. Dengan adanya sertifikasi seperti ini dapat menjadi program berkelanjutan demi ekosistem alam. Diperlukannya kerjasama baik dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Rangkuman ringkasan kajian pustaka dari penelitian terdahulu yakni:

Tabel II.1 Rangkuman Hasil Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Schwarze, S., Euler, M., Hein., Hettig, E., Holtkamp, A., dan Moser (2015)	<i>Rubber vs. oil palm: an analysis of factors influencing smallholders' crop choice in Jambi, Indonesia</i>	mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mana masyarakat lebih memilih kelapa sawit ketimbang karet seperti penghasilan lebih besar daripada karet, pekerjaan kelapa sawit lebih ringan ketimbang karet yang bekerja rutinitas serta pengaruh harga dari kelapa sawit dan karet.
Syahza, A. (2015)	<i>The Institutional Arrangements in the Palm Oil Sector: Effort to Spur Economic Growth in Rural Areas</i>	menjelaskan bahwa model koperasi kredit primer untuk anggota (KKPA) sebagai salah satu alternatif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar terutama mereka-mereka masyarakat yang berkebun dengan mandiri/swadaya.
Ismed, S., Mariana, M., dan Taufik (2012)	Pemetaan Dan Analisis Sisi Permintaan Dunia Kerja Pada Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Dimensi Kualitas,	bahwa kebutuhan tenaga kerja setiap tahun akan meningkat dengan semakin banyaknya perusahaan perkebunan berskala besar masuk ke Indonesia. Ini berbanding lurus dengan masih ada lahan basah yang

	Kuantitas, Lokasi Dan Waktu Di Kalimantan Selatan	belum dimanfaatkan oleh komoditi lain serta mengikuti permintaan dunia terhadap minyak kelapa sawit.
Srikujam, D. O (2015)	Pola Kemitraan di Perkebunan Kelapa Sawit(Studi pada PT. Mitra Austral Sejahtera di Desa Upe, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau)	bahwa permasalahan itu muncul dari perbedaan segi luas lahan yang diberikan dari versi KUD, versi Pemerintah Daerah dan versi Perusahaan
Krishna, V., Euler, M., Siregar, H., Qaim, M. (2016)	<i>Farmer heterogeneity and differential livelihood impacts of oil palm expansion in Sumatra, Indonesia</i>	yang menyoroti selalu ada konflik sosial dan konflik lahan antara petani kecil dengan perusahaan perkebunan. Konflik lahan sudah terjadi lama dan pemerintah hanya sebagai penonton serta cenderung lebih memihak kepada pihak perusahaan
Suwandi, S., Kaban, Y. T., dan Martono (2016)	Praktik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk. Unit Jambi	Mengatakan bahwa praktik CSR itu sendiri menjadi salah satu upaya untuk meredam konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan. Salah satu upaya ini adalah perusahaan membuat program berkelanjutan terhadap masyarakat baik itu dalam bentuk pendidikan, keterampilan, pembinaan masyarakat dan lain-lainnya.
Baswir, R., Achmad, N., Santosa, A., Indroyono, P.,	Pekebun Mandiri dalam Industri Perkebunan	mengatakan bahwa banyak hal yang bisa ditempuh pemerintah demi

Hudiyanto, W. I., Winarni, R., dan Hanu, M (2010)	Sawit di Indonesia.	memberdayakan para petani-petani mandiri/ swadaya maupun koperasi. Salah satunya adalah peninjauan kembali HGU yang telah ada agar dapat mengembalikan hutan-hutan adat milik masyarakat.
Perdana, A. (2008)	Dampak Pelaksanaan Program Kredit Kepada Koperasi Primer Untuk Anggotannya (KKPA) Terhadap Pendapatan Usaha tani Kelapa Sawit.	mengatakan bahwa program KKPA ini sangat efektif dalam meningkatkan pendapatan para petani dan juga terdapat perubahan perilaku dan tindakan dalam pengelolaan perkebunan dibanding dengan petani yang tidak/tanpa program KKPA
Dwiprabowo, H. (2005)	Analisa Kebijakan Skema Kredit Dan Pembiayaan Usaha Tani Hutan	mengatakan bahwa terdapat banyak faktor yang menjadi kegagalan dalam pola koperasi kredit yakni terdapatnya perantara, petani memerlukan biaya besar dalam sertifikasi tanah, diberikannya lahan yang curam sehingga memerlukan biaya yang tinggi dalam pembuatan terasering.
Nkongho, R., Feintrenie, L., Levang, P. (2014)	Strengths and weaknesses of the smallholder oil palm sector in Cameroon	menjelaskan bahwa pemerintah harus bisa melihat kekuatan dan kelemahan dari perkebunan kelapa sawit agar ada upaya keberlangsungan sumber daya alam. Kelemahan yang terjadi selama ini kurang maksimalnya pola kemitraan antara perusahaan besar dengan rakyat setempat.

<p>Coleman, M., Okyere, D. O. (2016)</p>	<p><i>Financing Small Scale Oil Palm Producers in the Western Region of Ghana-Ahanta West District</i></p>	<p>mengatakan bahwa peran sektor swasta sangat diperlukan sebagai penggerak roda pertumbuhan ekonomi masyarakat. pemerintah dan pemangku jabatan harus bisa mengambil kebijakan yang amat baik untuk bisa menggerakkan roda perekonomian masyarakat yang bermitra terhadap sektor swasta.</p>
<p>Hidayat, N. K., Glasbergen, P., dan Offermans, A. (2015)</p>	<p><i>Sustainability Certification and Palm Oil Smallholders' Livelihood: A Comparison between Scheme Smallholders and Independent Smallholders in Indonesia</i></p>	<p>untuk dapat meningkatkan pendapatan perekonomian para petani dengan skema kemitraan dan petani mandiri/swadaya dengan cara salah satunya adalah sertifikasi berkelanjutan.</p>
<p>Van der Ende, S. (2013)</p>	<p><i>Smallholders and sustainable palm oil production: A better understanding between policy arrangements and real-life practices A case study of the Siak smallholders site, Riau province,</i></p>	<p>mengatakan bahwa perlunya sertifikasi tanah perkebunan sawit serta para petaninya. Dengan adanya sertifikasi seperti ini dapat menjadi program berkelanjutan demi ekosistem alam.</p>

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas menyimpulkan bahwa pola kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat setempat wajib dilaksanakan untuk peningkatan perekonomian masyarakat sekitar. Penelitian terdahulu hanya membahas masalah teknis dalam hal pengelolaan perkebunan dan menghitung penghasilan dari perkebunan plasma. Penelitian ini akan meneliti tentang bagaimana evaluasi program kemitraan terutama dari pihak-pihak yang bermitra baik itu perusahaan, koperasi dan masyarakat.

II.2. Kerangka Teori

II.2.1 Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik telah sering didengar dan dibicarakan baik dikalangan masyarakat biasa serta dikalangan akademisi dalam rumpun ilmu-ilmu sosial. Banyak pengertian tentang kebijakan publik yang mana memberi dan penekanan berbeda-beda. Kebijakan publik secara luas menurut Robert Eyestone (Dikutip Winarno, 2012) mengatakan bahwa sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.

Menurut Thomas R. Dye (Dikutip Winarno, 2012) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak melakukan. Konsep seperti ini sangat luas karena kebijakan publik mencakup seluruh kegiatan pemerintah

dalam menanggapi sebuah permasalahan publik. Kebijakan publik diartikan sebagai badan pembuat aturan dari pemerintah bukan swasta serta tindakan apa yang dilakukannya. Menurut James E. Anderson (Dikutip Subarsono, 2016) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah.

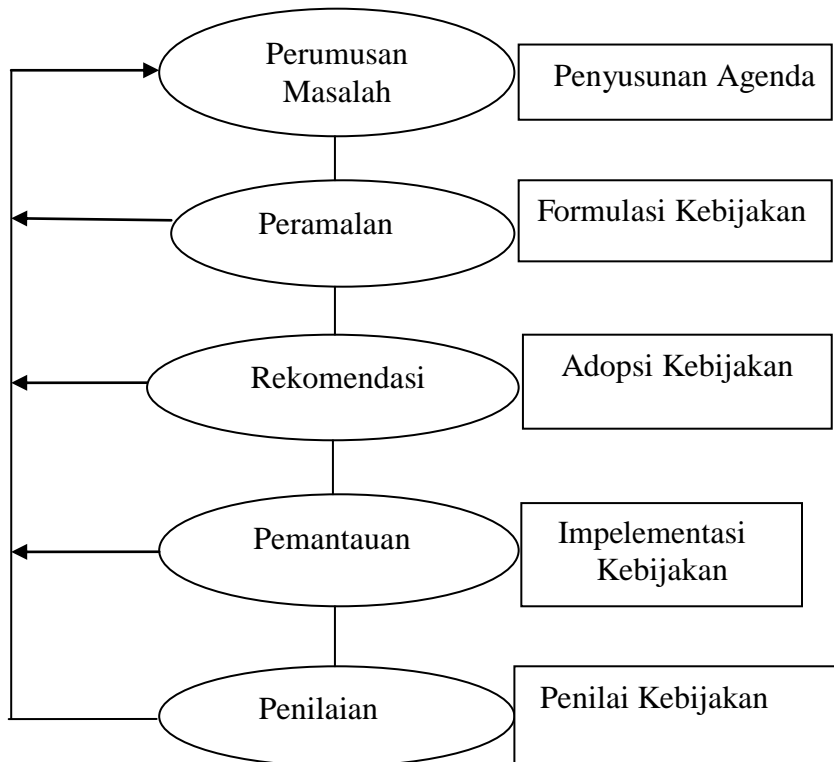
Dalam pandangan lain menurut David Easton mengatakan bahwa setiap kebijakan publik harus dapat mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai didalamnya (Dikutip Subarsono, 2016). Pendapat ini didukung Harrold L dan Abraham K mengatakan bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan pratika-pratika sosial yang pada masyarakat (Dikutip Subarsono, 2016). Sebagai contoh adalah terbitnya UU. No. 5 Tahun 2014 tentang desa. Kebijakan harus bisa mengakomodasi nilai-nilai sosial yang ada pada masyarakat.

Sementara itu, menurut Amir Santoso (dalam Winarno, 2012) terdapat banyak pendapat para ahli yang kesemuanya itu terbagi tiga bagian secara besar. Pandangan *pertama*, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. *Pandangan kedua*, melihat bahwa kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu. Kebijakan publik dianggap sebuah proses berkesinambungan

yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian kebijakan. Sedangkan *pandangan ketiga*, menganggap bahwa kebijakan publik sebagai rangkaian dari keputusan dan tindakan pemerintah. Ketiga pandangan diatas memunculkan berbagai sudut pandang yang berbeda dalam mendefinisikan kebijakan publik.

Kebijakan publik adalah sebuah alat yang digunakan pemerintah sebagai pemecah masalah publik yang ada dengan memperhatikan nilai-nilai serta praktek sosial masyarakat. kebijakan publik yang diterbitkan pemerintah tidak muncul begitu saja karena ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Sebelum dan sesudah adanya kebijakan diperlukannya sebuah analisis kebijakan.

Dalam menganalisis sebuah kebijakan diperlukannya tahap dari perumusan hingga penilaian kebijakan tersebut. Tahapan-tahapan kebijakan publik secara umum berawal dari perumusa kebijakan, penerapan kebijakan dan penilaian kebijakan. Sedangkan Tahapan kebijakan publik menurut William N. Dunn meliputi yakni: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Keseluruhan rangkaian kebijakan publik ini merupakan tahap-tahap yang paling tidak harus dilalui sebelum mengesahkan sebuah kebijakan publik.



Gambar II. 1 Proses Kebijakan Publik

Sumber: William N. Dunn, 2003:25

Menurut Winarno (2012) proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Masalah-masalah yang ada telah disaring untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Ada beberapa masalah yang mesti dibahas dalam kurun waktu cepat dan ada

juga masalah yang masih belum disentuh karena alasan-alasan tertentu.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah yang telah masuk kemudian dibahas dan dicari pemecahan solusi terbaik. Berbagai solusi-solusi masalah tersebut bisa dijadikan alternatif kebijakan jika solusi yang awal belum maksimal.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Kebijakan-kebijakan yang ditawarkan oleh perumus kebijakan kemudian akan dipilih salah satu menjadi alternatif kebijakan tersebut diadopsi dari dukungan mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah diputuskan maka akan dilaksanakan oleh badan-badan administrasi hingga ketingkat bawah serta memobilisasikan sumberdaya manusia dan finansial. Dalam tahap ini kebijakan yang telah diputuskan harusnya dijalankan dan tahap ini pula berbagai kepentingan akan saling bersaing.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan akan dinilai/evaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dijalankan mampu memecahkan masalah. Oleh karena itu dibutuhkan kriteria-kriteria atau ukuran-ukuran yang menjadi tolak ukur untuk menilai kebijakan tersebut. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk memecahkan masalah serta meraih dampak yang diinginkan.

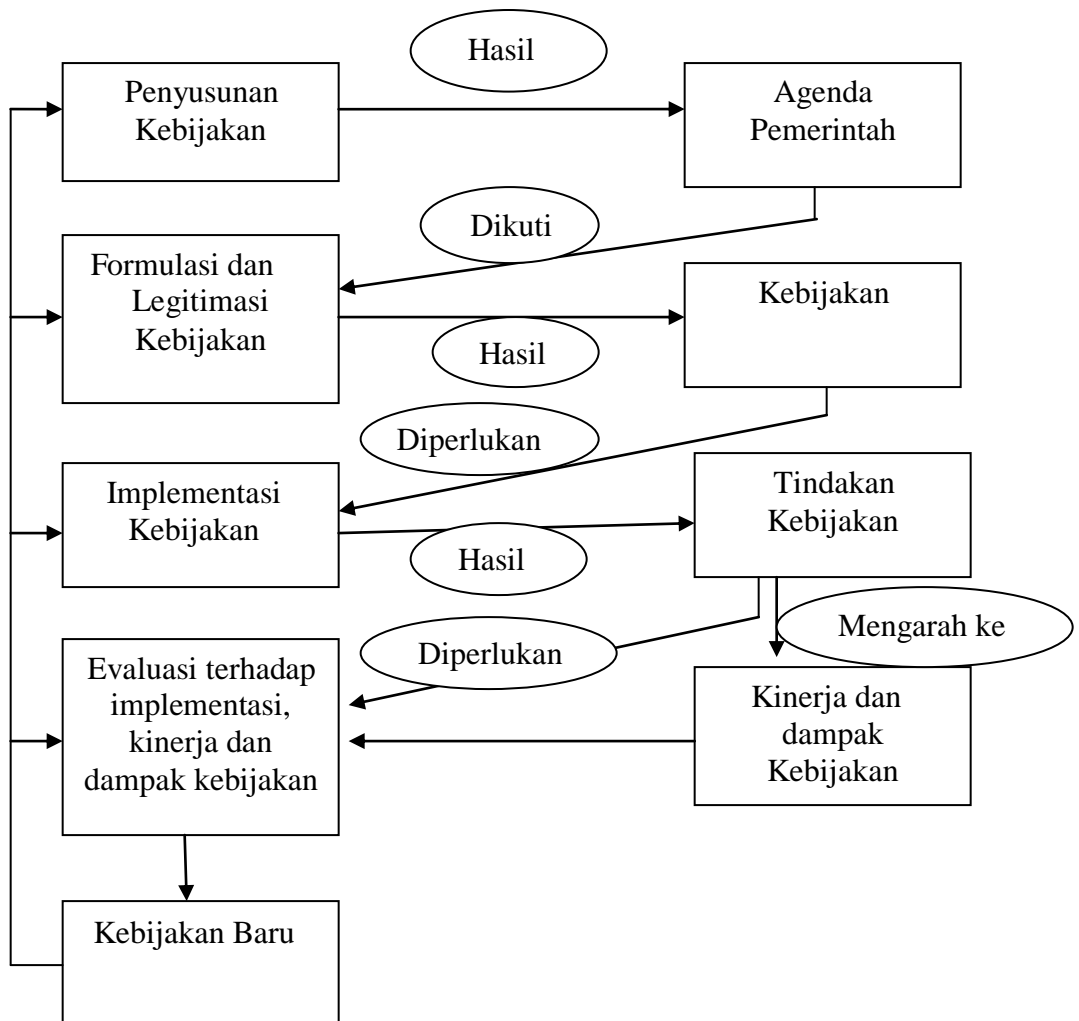
Sedangkan menurut James Anderson (dalam Subarsono, 2016) sebagai pakar kebijakan publik menetapkan ada beberapa proses kebijakan publik sebagai berikut:

- a. Formulasi masalah (*problem formulation*): apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah? Bagaimanakah masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?
- b. Formulasi kebijakan (*formulation*): Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
- c. Penentuan kebijakan (*adoption*): Bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan?

Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?

- d. Implementasi (*implementation*): Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak isi kebijakan?
- e. Evaluasi (*evaluation*): Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

Proses kebijakan publik diatas jelas bahwa dari tahap awal hingga akhir mencakup apa permasalahan, bagaimana pemecahannya, siapa implementornya dan dampak hasil dari kebijakan dapat memberi dampak yang baik. Dalam pandangan Ripley (Dalam Subarsono, 2016) mengemukakan beberapa tahapan kebijakan publik sebagai berikut:



Gambar II. 2 Tahapan Kebijakan Publik

Sumber: Subarsono, 2016:11

Diatas adalah skema dimana proses kebijakan publik berlangsung dari awal penyusunan hingga evaluasi akhir. Dalam tahap penyusunan agenda ada tiga hal yang harus dipahami; (1) membangun pola pikir dikalangan pembuat kebijakan bahwa sebuah fenomena itu riil dianggap suatu masalah. Masalah yang dimaksud riil masalah yang ada dan cakupan masyarakat luas/

publik; (2) adanya batasan masalah yang jelas agar spesifik; (3) perlunya dukungan agar masalah tersebut masuk dalam agenda pemerintah untuk dibuat kebijakan publik.

Hal ini dengan cara pergerakan komunitas yang ada dalam masyarakat serta kekuatan-kekuatan politik serta peran media masa. Kemudian tahap formulasi dan legitimasi ini ada analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah tersebut, selanjutnya untuk dikembangkan menjadi alternatif-alternatif kebijakan sehingga alternatif yang dipilih menjadi kebijakan yang dipilih.

Pada tahap implementasi kebijakan diperlukannya dukungan sumber daya baik sumber daya manusia dan sumber daya financial serta susunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam mekanisme implementasi kebijakan harus ada insentif dan sanksi supaya kebijakan tersebut tepat sasaran. Kemudian tahap tindakan kebijakan akan menghasilkan kinerja dan dampak. Selanjutnya akan dievaluasi terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Hasil evaluasi akan bermanfaat untuk menjadi masukan kebijakan selanjutnya agar kebijakan yang dihasilkan lebih berdampak baik untuk kedepan.

II.2.2 Evaluasi Kebijakan Publik

Apabila kebijakan publik dianggap sebagai sebuah kegiatan yang berurutan maka evaluasi kebijakan ini adalah tahap akhir dari proses kebijakan tersebut. Namun pada hakikatnya, evaluasi kebijakan ini sebagai titik ulang perbaikan untuk kebijakan selanjutnya agar lebih baik. Pada dasarnya, evaluasi kebijakan adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja/dampak yang dihasilkan. Evaluasi terhadap suatu kebijakan tidak mempunyai batasan waktu yang baku. Evaluasi terhadap kebijakan publik harus dilaksanakan secara terus menerus. Kebijakan itu bersifat fleksibel tergantung pada situasi dan kondisi berlakunya dan tidak berlakunya.

Evaluasi dilaksanakan karena tidak semua kebijakan tersebut berjalan sesuai keinginan atau capaian target. Singkatnya evaluasi itu suatu kegiatan menilai suatu “dampak/manfaat” suatu kebijakan. Penilaian dari suatu kebijakan menyangkut estimasi terhadap substansi dan dampaknya.

Menurut Lester dan Stewart (Dalam Winarno, 2012) bahwa evaluasi kebijakan dapat dibagi menjadi dua. *Pertama* adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan menggambarkan dampaknya. *Kedua* adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dari kedua hal diatas

bahwa begitu pentingnya suatu evaluasi kebijakan. Pentingnya evaluasi kebijakan ini dapat menghasilkan pengetahuan baru terhadap kekurangan-kekurangan dari kebijakan dan menjadi dasar tambahan untuk memperbaiki kebijakan selanjutnya. Suatu kebijakan publik tidaklah dapat selamanya berlaku karena waktu berjalan akan mengubah pola-pola yang ada pada sendi-sendi kehidupan. Pada akhirnya, kegiatan evaluasi kebijakan itu harus dilakukan demi adanya pembaruan dari setiap kebijakan publik.

Secara garis besar tujuan-tujuan dari evaluasi kebijakan adalah:

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Untuk dapat melihat tingkatan capaian suatu kebijakan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Untuk mengetahui manfaatnya dan besaran biaya suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Untuk mengukur seberapa besar dan kualitas pengeluaran suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Berdampak positif atau negatif suatu kebijakan tersebut.
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan dengan cara membandingkan tujuan dan sasaran dengan capaian yang dihasikan.
6. Sebagai bahan masukan untuk kebijakan yang akan datang agar lebih maksimal dan baik.

Dari tujuan-tujuan evaluasi kebijakan diatas jelas bahwa kegiatan evaluasi ini amatlah penting dalam siklus kebijakan publik. Tujuan evaluasi adalah sebagai bentuk salah satu perbaikan kebijakan di masa akan datang yang berkelanjutan. Dengan adanya tujuan ini maka tidak terlepas dari alasan-alasan dari kegiatan evaluasi ini. Tidak jauh beda dengan tujuan evaluasi bahwa alasan evaluasi salah satunya ingin mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan, berhasil atau gagal, pemenuhan bentuk tanggungjawab, tidak mengulangi kesalahan yang sama dan memberi manfaat yang positif pada sasaran. Akhirnya, apapun jenis kebijakan atau dalam bidang apapun tetap memerlukan kegiatan evaluasi dalam proses kebijakan publik.

II.2.3 Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Anderson (Dalam Winarno, 2012) membagi evaluasi kebijakan menjadi tiga tipe. Tipe pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Apabila evaluasi kebijakan hanya dipandang kegiatan fungsional maka kegiatan evaluasi itu sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Para pembuat kebijakan akan selalu membuat pertimbangan-pertimbangan mengenai manfaat dari kebijakan-kebijakan. Ini menandai bahwa pertimbangan tersebut akan terpisah dari pengaruh ideologi, kepentingan-kepentingan serta lain-lainnya.

Evaluasi seperti ini akan menimbulkan konflik antara evaluator-evaluator yang ada karena berbeda menggunakan sudut pandang dan kriteria untuk menilai. Tipe kedua, evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Evaluasi ini berangkat dari pertanyaan-pertanyaan dasar yang menyangkut apakah, bagaimanakah dan seterusnya.

Tipe ketiga, evaluasi kebijakan yang sistematis. Tipe ini secara komparatif masih dianggap baru tetapi telah menjadi perhatian peminat kebijakan publik. Evaluasi sistematis ini bisa juga disebut evaluasi ilmiah. Evaluasi sistematis ini melihat program-program kebijakan yang dilaksanakan secara obyektif untuk melihat sejauh mana capaian kebijakan tersebut. Dengan evaluasi ini akan memberikan dampak lebih baik karena didasari pertanyaan-pertanyaan apakah berjalan baik kebijakan itu? tercapai sasaran? Gagal atau berhasil? Dengan seperti ini akan memberikan rekomendasi-rekomendasi kebijakan selanjutnya.

II.2.4 Pendekatan Terhadap Evaluasi

Menurut Dunn (2003) ada tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi yakni (1) evaluasi semu (*pseudo evaluation*); (2) evaluasi formal; (3) evaluasi keputusan teoritis. Ketiga pendekatan evaluasi dimaksud sebagai berikut:

1. Evaluasi Semu adalah pendekatan evaluasi menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan, tanpa menanyakan manfaat/dampak dari kebijakan tersebut. Asumsi dasarnya adalah ukuran manfaat/dampak itu merupakan sesuatu yang terbukti secara sendirinya atau tidak kontroversial.
2. Evaluasi Formal adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Asumsi dasar adalah sasaran dan target yang ditetapkan secara formal merupakan ukuran yang tepat untuk melihat manfaat dampak dari kebijakan tersebut.
3. Evaluasi Keputusan Teoritis adalah pendekatan menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan secara eksplisit dinilai oleh berbagai pelaku kebijakan. Evaluasi keputusan teoritis ini berusaha untuk memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan target dari pelaku kebijakan baik tersembunyi ataupun dinyatakan.

Tabel II.2 Pendekatan Evaluasi

Pendekatan	Tujuan	Asumsi	Metodologi
Evaluasi Semu	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi valid tentang hasil kebijakan	Ukuran manfaat akan terbukti dengan sendirinya/tidak kontroversial	1. Eksperimentasi sosial 2. Akutansi sistem sosial 3. Pemeriksaan sosial 4. Sintesis riset dan praktik
Evaluasi Formal	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi valid tentang hasil kebijakan secara formal	Tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut akan diumumkan yang merupakan ukuran yang tepat	1. Evaluasi Perkembangan 2. Evaluasi eksperimental 3. Evaluasi proses restrospektif 4. Evaluasi hasil restrospektif
Evaluasi Keputusan Teoritis	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi valid tentang hasil kebijakan secara eksplisit diinginkan oleh pembuat kebijakan	Tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang secara formal diumumkan atau didiamkan merupakan ukuran yang tepat dan manfaat/dampak	1. Penilaian tentang dapat tidaknya dievaluasi 2. Analisis utilitas multiatribut

Sumber: William N. Dunn, 2003:612

Sedangkan menurut Ernest R. House (dalam Riant N, 2004) membagi model-model evaluasi menjadi 8 yakni:

1. Model sistem yang berindikator efisiensi,
2. Model Perilaku yang berindikator produktivitas dan akuntabilitas,

3. Model formulasi keputusan yang berindikator keefektifan dan keterjagaan kualitas,
4. Model tujuan-bebas yang berindikator pilihan pemakai dan manfaat sosial,
5. Model kekritisian seni yang berindikator standar yang terus membaik dan kesadaran semakin meningkat tinggi,
6. Model review professional yang berindikator penerimaan professional
7. Model kuasi-legal yang berindikator resolusi/keputusan mufakat,
8. Model studi kasus yang berindikator pemahaman atas keberagaman.

Selanjutnya, muncul model evaluasi yang berdasarkan teknik evaluasi nya (dalam Riant N, 2004) yakni:

1. Evaluasi komparatif/perbandingan. Teknik evaluasi ini jelas bermakna membandingkan perumusan dan perencanaan dengan hasil/dampak dari kebijakan tersebut.
2. Evaluasi historikal. Teknik evaluasi ini bergerak melakukan evaluasi berdasarkan asal muasal kebijakan tersebut muncul untuk dilaksanakan.

3. Evaluasi laboratorium/eksperimental. Teknik evaluasi ini melakukan evaluasi dengan eksperimental pada suatu laboratorium.
4. Evaluasi Ad hock. Teknik evaluasi ini dilakukan secara tiba-tiba/spontan dalam waktu yang singkat untuk melihat gambaran perjalanan suatu kebijakan.

Adapun beberapa model evaluasi program menurut Kaufman dan Thomas dalam Arikunto (2014) yakni:

1. *Goal-oriented Evaluation Model*

Model evaluasi ini dikembangkan oleh Tyler. Memfokuskan sejauh mana tujuan dari program tersebut untuk dicapai. Pencapaian tersebut ditetapkan jauh sebelum program ini dilaksanakan. Dampak dari program tersebut akan terasa dampaknya jika berhasil atau tidak.

2. *Goal-free Evaluation Model*

Model evaluasi ini dikembangkan oleh Michael Scriven pada tahun 1972. Model evaluasi ini tidak berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai dari program tersebut. Ini berbanding terbalik dengan model yang diatas. Model evaluasi seperti ini membatasi agar tidak terjadi bias dalam mengevaluasi sebuah

program. Fokus dari model evaluasi ini adalah perubahan perilaku setelah dilaksanakannya sebuah program.

3. *Formatif-summatif Evaluation*

Model evaluasi ini dikembangkan oleh Michael Scriven.

Pada model ini terbagi menjadi dua jenis yakni:

- a. Evaluasi Formatif ini bersifat internal demi meningkatkan kapabilitas sebuah organisasi/badan. Model ini langsung memantau program yang sedang berjalan untuk melihat sejauh mana pelaksanaannya.
- b. Evaluasi Sumatif ini terjadi pada akhir program setelah pelaksanaan selesai. Ini bertujuan untuk melihat ketercapaian target dan memberi rekomendasi serta saran terhadap program tersebut.

4. *Countenance Evaluation Model*

Model evaluasi ini dikembangkan oleh Stake. Model ini mengidentifikasi sebuah program pada 3 tahapan. Pada tiap tahapan akan mengungkap dua hal yaitu apa yang diinginkan dan apa yang akan terjadi.

- a. *Antecedent phase*, kondisi ini melihat awal dari sebuah program tersebut. Dengan kata lain, tahap ini mempersiapkan

segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut.

- b. *Transaction phase*, pada kondisi akan melihat langsung sejauh mana *pelaksanaan* program tersebut. Berjalan sesuai keinginan atau tidak.
- c. *Outcomes phase*, pada kondisi ini akan melihat perubahan yang terjadi setelah program itu dilaksanakan.

5. *Responsive Evaluation Model*

Model evaluasi ini bentuk dari perkembangan dari model *Countenance Evaluation Model* oleh Stake. Evaluasi ini berfokus pada berbagai pihak dari program yang telah dilaksanakan dan mengamati perubahan-perubahan dampak dari program tersebut.

6. *CIPP Evaluation Model*

Model evaluasi ini dikembangkan oleh Stufflebeam. CIPP ini singkatan dari context, input, process, dan product. Sederhananya adalah model evaluasi CIPP ini mengevaluasi sebuah program secara utuh dari awal hingga akhir. Model evaluasi ini relatif lebih panjang dalam proses melakukan evaluasi sebuah program. Pada model ini juga mengharuskan melakukan evaluasi setiap komponen-komponen yang ada pada program tersebut.

- a. Context Evaluation ini melihat bagaimana kondisi dimana program tersebut akan dilaksanakan. Terkait dengan hal seperti landasan hukum untuk menjalankan program dan kriteria-kriteria populasi sebagai target program.
 - b. Input Evaluation ini melihat masukan-masukan terhadap lancarnya program tersebut. Misalnya bagaimana sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta kecukupan pembiayaan sebuah program.
 - c. Process Evaluation ini berfokus pada pelaksanaan program tersebut. Evaluasi proses ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan program tersebut. Sampai sejauh mana program sudah dilaksanakan baik faktor pendukung dan penghambatnya.
 - d. Product Evaluation ini berfokus pada pengukuran hasil/dampak dari program yang telah dilaksanakan. Melihat perubahan-perubahan yang telah terjadi setelah pelaksanaan program tersebut.
7. CSE-UCLA Evaluation Model (*Center for the Study of Evaluation, University of California at Los Angeles*). Model evaluasi ini hampir mirip dengan CIPP dan lebih komprehensif.

Setidaknya evaluasi CSE-UCLA ini melibatkan 5 tahapan evaluasi yakni:

- a. *Needs assessment* ini menggambarkan dan mengidentifikasi kondisi kenyataan dan kondisi yang diinginkan dampak dari program tersebut.
 - b. *Program planning and development* melihat apakah program yang *direncanakan* sesuai dengan target tujuan serta membuat strategi dalam menjalankan program tersebut.
 - c. Tahap *pelaksanaan* ini berfokus pada pelaksanaan program tersebut. Apakah program berjalan sesuai rencana awal atau akan terjadi perubahan.
 - d. Tahap hasil ini fokus mengevaluasi pada hasil yang telah dicapai dari program tersebut.
 - e. Tahap dampak ini berfokus pada pengukuran penilaian terhadap hasil dari *program* tersebut. Apakah memberi manfaat baik/buruk. Memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan program selanjutnya.
8. *Discrepancy Evaluation Model*

Evaluasi ini dikembangkan oleh Malcom Provus. *Discreapancy* ini istilah bahasa Inggris yang kemudian dimaknai dalam bahasa Indonesia sebagai “kesenjangan”. Model ini

berfokus pada perbandingan hasil program dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan sejak awal perencanaan. Evaluasi ini menggunakan 4 tahap dalam evaluasi sebuah program yakni:

- a. Identifikasi program, disini evaluasi berfokus pada penentuan dan target tujuan.
- b. Penyusunan program, evaluasi berfokus pada substansi program, cara-cara, metode, mekanisme untuk mencapai tujuan tersebut.
- c. Pelaksanaan kegiatan program, evaluasi berfokus untuk mengukur perbedaan yang terjadi antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
- d. Hasil yang dicapai program, pada evaluasi ini memaknai hasil-hasil temuan evaluasi dan memberikan rekomendasi untuk program selanjutnya.

II.2.5 Metode Evaluasi

Untuk melakukan evaluasi terdapat beberapa metode terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan yakni: *single program after-only*, *single program before-after*, *comparative after-only*, dan *comparative before-after*. Dalam hal evaluasi akan terdapat kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang akan dikenai dalam hal evaluasi kebijakan.

Kelompok eksperimen adalah kelompok yang mendapat program dari kebijakan tersebut. Sedangkan kelompok kontrol adalah kelompok yang tidak mendapat program tersebut tetapi memiliki karakteristik yang sama atau hampir sama dengan kelompok eksperimen. Evaluator dapat membandingkan kondisi sebelum dan sesudah diimplementasikan suatu program atau hanya melihat kondisi setelah program tersebut diimplementasikan.

Tabel II.3 Metodologi Evaluasi Program

Jenis Evaluasi	Pengukuran Kondisi		Kelompok Kontrol	Informasi yang Diperoleh
	Sebelum	Sesudah		
Single program after only	Tidak	Ya	Tidak ada	Keadaan kelompok sasaran
Single program before-after	Ya	Ya	Tidak ada	Perubahan kelompok sasaran
Comparative after only	Tidak	Ya	Ada	Keadaan kelompok sasaran dan kontrol
Comparative before-after	Ya	Ya	Ada	Efek program terhadap kelompok sasaran dan kontrol

Sumber: Finsterbusch dan Motz (Dalam Subarsono, 2016).

Dalam evaluasi kebijakan, dampak sebuah program juga harus dicermati bahwa dampak tersebut benar-benar dari akibat dari program yang dievaluasi. Pada kenyataannya, bahwa program-program yang ada secara bersamaan dijalankan seringnya tumpang tindih. Seorang evaluator harus sangat jeli mengevaluasi program

kebijakan agar terlihat jelas dampak yang diberikan oleh program tersebut. Tidak mudah juga untuk mengklaim bahwa suatu dampak itu lahir tunggal dari program tertentu. Bisa juga dampak tersebut dari program lain yang berdampingan.

II.2.6 Kemitraan

Kemitraan atau *Partnership* bila diterjemahkan kebahasa yang sederhana mempunyai arti kerjasama. Kemitraan ini bentuk kerjasama yang dilakukan dua badan/perusahaan ataupun lebih dalam peningkatan tujuan/target yang sama. Pemerintah mempunyai kewajiban membuat kebijakan publik yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan. Dalam hal ini, pemerintah menemui kendala yakni keterbatasan-keterbatasan sumber-sumber daya. Tidak heran bahwa pemerintah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak demi meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam hal tertentu. Biasanya sering disebut dengan konsep *Public Private Partnership* (PPP). Konsep ini lahir dari administrasi publik yang terus berkembang demi ketersediaan sarana dan prasarana publik.

Kemitraan memiliki makna bahwa ada hubungan kerjasama dari beberapa badan/keompok baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat yang mempunyai tujuan pembenahan dan peningkatan

dalam hal tertentu. Dengan pertimbangan yang matanglah maka kemitraan ini baik untuk dijalankan terutama kesamaan tujuan/target tertentu. Pola-pola kemitraan/kerjasama akan banyak memainkan para aktor dari pemerintah, swasta dan masyarakat saling bekerjasama atas dasar aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama. Kemitraan-kemitraan yang ada secara langsung membuat pola-pola interaksi yang baik dari kesemua pihak yang bermitra. Kemitraan pemerintah dengan pihak swasta akan mampu menginovasi kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan demi ketersediaan sarana dan prasarana publik.

Kemitraan menurut Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1977 tentang Kemitraan. Dalam pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa

“kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan”.

Pengertian kemitraan diatas sudah sangat komprehensif dari pihak yang bermitra, prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan kerjasama untuk saling memerlukan, menguatkan serta saling menguntungkan. Dalam kemitraan harus diperhatikan juga bahwa harus ada komitmen terhadap aturan dan prinsip yang telah disepakati. Secara umum, prinsip-prinsip kemitraan itu ada 3 yakni:

1. Kesetaraan atau persamaan

Kesetaraan ini dimaksudkan sebagai kesejajaran tiap kelompok yang bermitra baik dari pemerintah, swasta, pengelola dan masyarakat.

2. Keterbukaan atau transparansi

Transparansi sangatlah penting sebagai salah satu kunci kesuksesan dari kemitraan. Keterbukaan dari awal kemitraan dimulai hingga waktu berakhirnya kemitraan sesuai kesepakatan bersama. Keterbukaan ini akan memunculkan kepercayaan dari setiap pihak yang bermitra.

3. Saling menguntungkan

Prinsip saling menguntungkan ini menjadi hasil/dampak yang akan diterima oleh semua pihak yang bermitra. Dampaknya adalah target bersama akan tercapai oleh semua pihak yang bekerjasama.

Kemitraan yang dijalankan oleh pemerintah bersama pihak swasta sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat. misalnya dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang menyatakan bahwa setiap perusahaan yang mempunyai lahan perkebunan 250 hektar atau lebih maka wajib

menyediakan perkebunan bagi masyarakat sekitar dengan luas 20% dari areal inti perkebunan.

Perkebunan Inti Rakyat (PIR) adalah pola pengembangan perkebunan rakyat di wilayah lahan bukaan baru dengan perkebunan besar sebagai inti yang membangun dan membimbing perkebunan rakyat disekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkelanjutan. Dalam pola kemitraan bidang perkebunan ini sangat menguntungkan berbagai pihak baik pemerintah, perusahaan yang berinvestasi, menghidupkan perkoperasian dan peningkatan pendapatan perekonomian masyarakat sekitar.

II.2.7 Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dinyatakan bahwa pada pasal 1 ayat (1), koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh koperasi itu harus menyangkut segala hal untuk mencapai tujuan bersama anggota koperasi. Koperasi bertujuan

meningkatkan perekonomian anggota koperasi secara khusus dan masyarakat umum untuk mencapai peningkatan kesejahteraan sosial.

Fungsi dan peran koperasi :

1. Membuat dan meningkatkan potensi-potensi ekonomi pada anggota serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
2. Ada peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Memperkuat perekonomian masyarakat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional
4. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan atas asas kekeluargaan.

Dari fungsi dan peran koperasi sangat baik sebagai salah satu penopang perekonomian masyarakat-masyarakat kecil. Dimana koperasi dibangun diatas rasa kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perpaduan pengelolaan koperasi dengan perusahaan besar akan sangat menguntungkan kedua belah pihak .

Jenis-jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas wilayah kerja :

1. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang. Umumnya koperasi primer ini minimal beranggotakan 20 orang.
2. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Koperasi sekunder ini terdiri dari

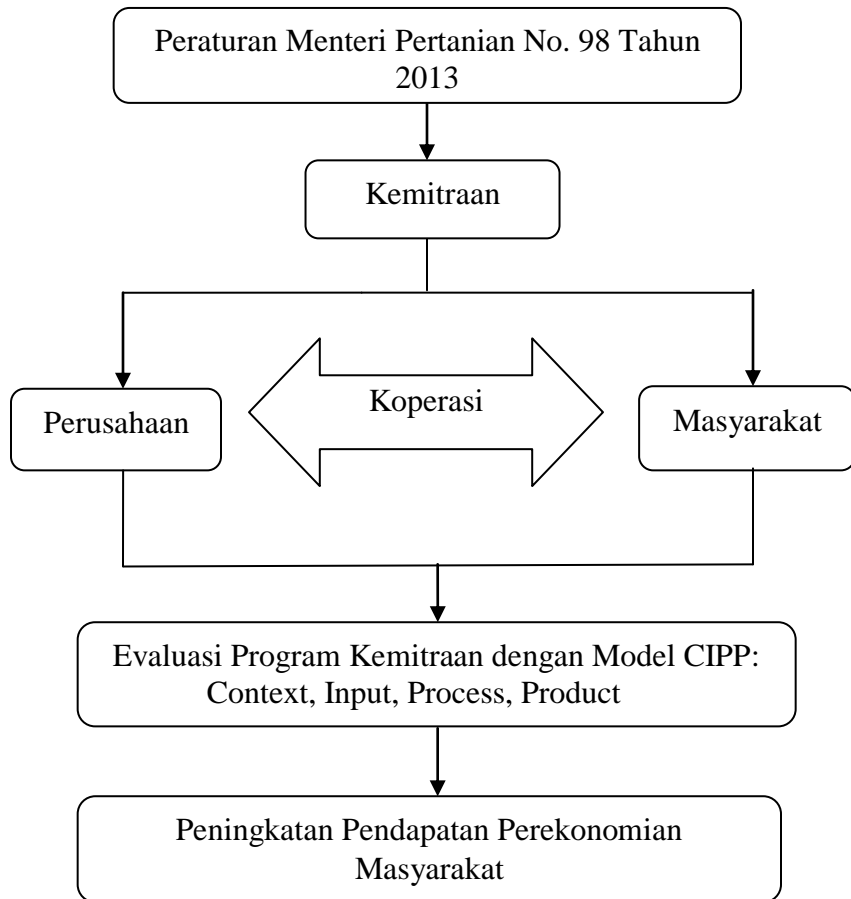
beberapa badan-badan koperasi karena memiliki wilayah kerja yang luas minimal terdiri dari 3 koperasi yang mendirikan.

Koperasi harus ada kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan perekonomian baik primer atau pun sekunder. Seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus berdasarkan prinsip-prinsip perkoperasian yaitu:

1. Keanggotaan bersifat terbuka dan suka rela
2. Pengelolaan secara demokratis
3. Pembagian hasil usaha dibagikan secara adil sesuai dengan usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian
6. Adanya pendidikan perkoperasian
7. Kerja sama yang baik antar koperasi

Dari prinsip-prinsip diatas adalah gambaran bagaimana koperasi itu akan bertindak dalam setiap kegiatan baik secara anggota individu maupun koperasi bekerjasama dengan pihak lain.

II.3 Kerangka Pikir



Gambar II. 3 Kerangka Pikir Penelitian

II.4 Definisi Konseptual

Definisi konseptual ini dimaksudkan untuk memberi gambaran terhadap objek penelitian. Melalui konsep ini gambaran/objek tentang penelitian yang akan dijelaskan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda. Definisi konseptual dalam penelitian adalah :

1. Evaluasi kebijakan Publik adalah suatu kegiatan untuk menilai “dampak/manfaat” dari kebijakan yang telah dilaksanakan.
2. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
3. CIPP Evaluation Model yakni Context, Input, Process dan Product Evaluation. Context Evaluation ini terkait dengan hal seperti landasan hukum untuk menjalankan program dan kriteria-kriteria populasi sebagai target program.
4. Input Evaluation Model ini berfokus pada sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta kecukupan pembiayaan program.
5. Process Evaluation Model ini berfokus pada sejauh mana program tersebut telah dilaksanakan. Faktor pendukung dan penghambat.
6. Product Evaluation Model ini berfokus pada pengukuran hasil/dampak program yang telah dilaksanakan.

II.5 Definisi Operasional

Definisi operasional ini memberikan operasional variabel baik indikator dan sub-indikator dalam meneliti objek penelitian:

Tabel II. 4 Indikator dan Sub-indikator penelitian

No	Variabel	Indikator	Sub-Indikator
1.	Evaluasi Konteks/ <i>Context</i>	1. Peraturan-peraturan terkait kemitraan	1. Peraturan-peraturan tentang kewajiban kemitraan dan Kriteria usaha-usaha yang wajib melakukan kemitraan
		2. Masyarakat yang menjadi sasaran dari program kemitraan	1. Kriteria-kriteria masyarakat yang menjadi sasaran program kemitraan
2.	Evaluasi Masukan/ <i>Input</i>	1. Sumber daya manusia	1. Kesesuaian keahlian SDM yang bekerja dalam pengelolaan perkebunan plasma
		1. Sarana dan Prasarana	1. Ketersediaan lahan untuk perkebunan plasma
		2. Sumber Pendanaan	1. Ketersediaan anggaran untuk membuka lahan perkebunan plasma masyarakat
3.	Evaluasi Proses/ <i>Process</i>	1. Pelaksanaan Program Kemitraan	1. Bagaimana pelaksanaan program kemitraan baik faktor pendukung dan penghambatannya
4.	Evaluasi Hasil/ <i>Product</i>	1. Dampak Program Kemitraan Terhadap Perekonomian Masyarakat	1. Apa dampak program kemitraan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat